



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH



▲ *Image source:*
wowwindowboxes.com

PERIODE 4 s.d. 15 Januari 2021

Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Subandono • Sugiyarto • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa

KINERJA DAERAH

Kondisi Umum dan Isu Strategis Pengelolaan Sistem Irigasi

Potensi air permukaan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebesar 691,3 miliar m³/tahun. Dari potensi tersebut, saat ini sudah dimanfaatkan sebesar 222,6 miliar m³/tahun diantaranya untuk sektor irigasi sebesar 177,1 miliar m³/tahun. Namun demikian, potensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa isu strategis yakni:



Climate Change

Terjadinya perubahan iklim sebagai dampak kerusakan lingkungan semakin meningkatkan ancaman bencana kekeringan dan banjir. Terjadi penurunan dan peningkatan jumlah curah hujan 1% s/d 4 % pada periode yang berbeda. Musim kemarau berlangsung lebih lama dengan curah hujan semakin berkurang, sebaliknya musim hujan berlangsung singkat dengan intensitas semakin tinggi.



Tingginya Konversi Lahan

Meningkatnya konversi fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, dimana laju alih fungsi lahan pertanian pada periode 1981 – 1999 sebesar 90.417 Ha/tahun sedangkan periode 1999 – 2002 sebesar 187.720 Ha/Tahun.



Belum Optimalnya Keandalan dan Kinerja Irigasi

- Rendahnya keandalan air irigasi di mana hanya 76.542 Ha (10,7%) luas irigasi permukaan yang airnya dijamin oleh waduk, sisanya sebesar 89,3% mengandalkan debit sungai. Kinerja jaringan irigasi sangat tergantung pada kondisi wilayah sungai.
- Berdasarkan audit kinerja jaringan irigasi 2014, kondisi dan fungsi prasarana irigasi permukaan nasional masih belum optimal. Seluas 46% atau sekitar 3,3 juta ha prasarana irigasi dalam kondisi rusak, dimana 7,5 % merupakan kewenangan pusat sedangkan 8,26% merupakan irigasi kewenangan provinsi dan 30,4% merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Sumber: Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Indonesia, Ditjen SDA KemenPUPR (2018)

Kinerja Output DAK Irigasi TA 2020

Pembangunan Irigasi

1. Sulawesi Tengah 1.609 Ha
2. Lampung 1.051 Ha
3. Sumatera Selatan 1.035 Ha

1. Jawa Timur 102 Ha
2. Gorontalo 114 Ha
3. Sulawesi Tenggara 137 Ha

Rehabilitasi Irigasi

1. Jawa Timur 30.634 Ha
2. Jawa Tengah 14.817 Ha
3. Sulawesi Selatan 14.276 Ha

1. Kep. Riau 37 Ha
2. Kalimantan Utara 155 Ha
3. Papua Barat 263 Ha

Peningkatan Irigasi

1. Kalimantan Selatan 668 Ha
2. DI Yogyakarta 488 Ha
3. Sumatera Selatan 427 Ha

1. Jawa Barat 1 Ha
2. Sumatera Barat 14 Ha
3. Sulawesi Utara 42 Ha

Bendungan

1. Jawa Tengah 81 buah
2. Jawa Timur 53 buah
3. Jawa Barat 34 buah

1. Kalimantan Utara, Papua, Jambi masing-masing 1 buah
2. Gorontalo, Riau, Bali masing-masing 2 buah
3. Sumatera Selatan 3 buah

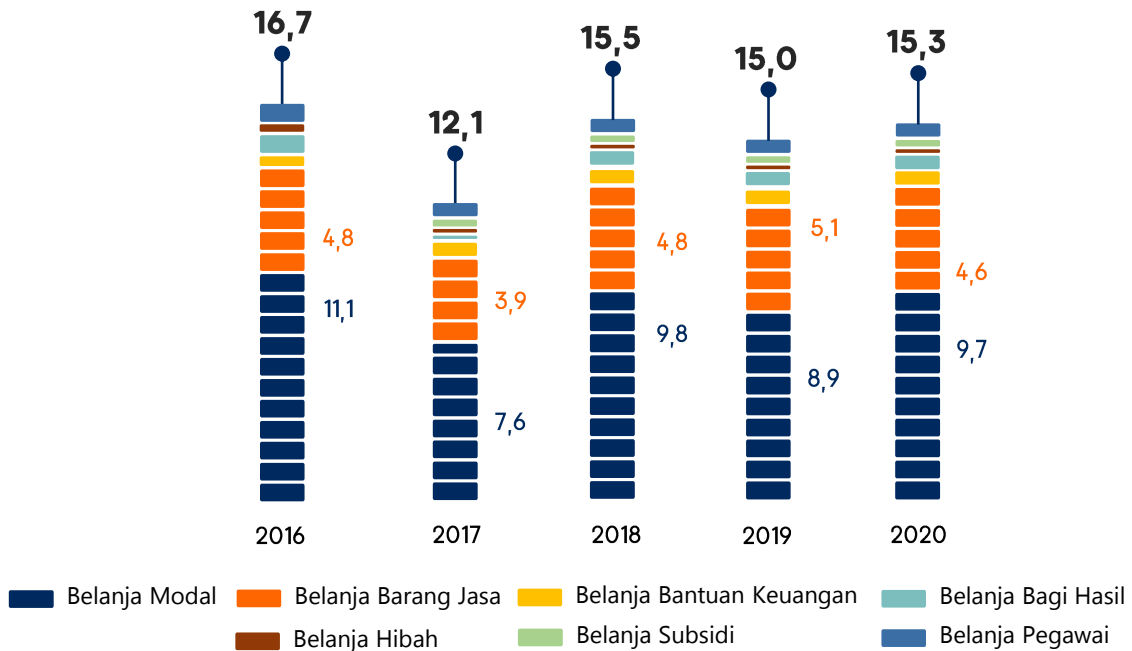
▲ Top 3 ▼ Bottom 3

(Sumber: Dit PFID KemenPUPR, 2021)

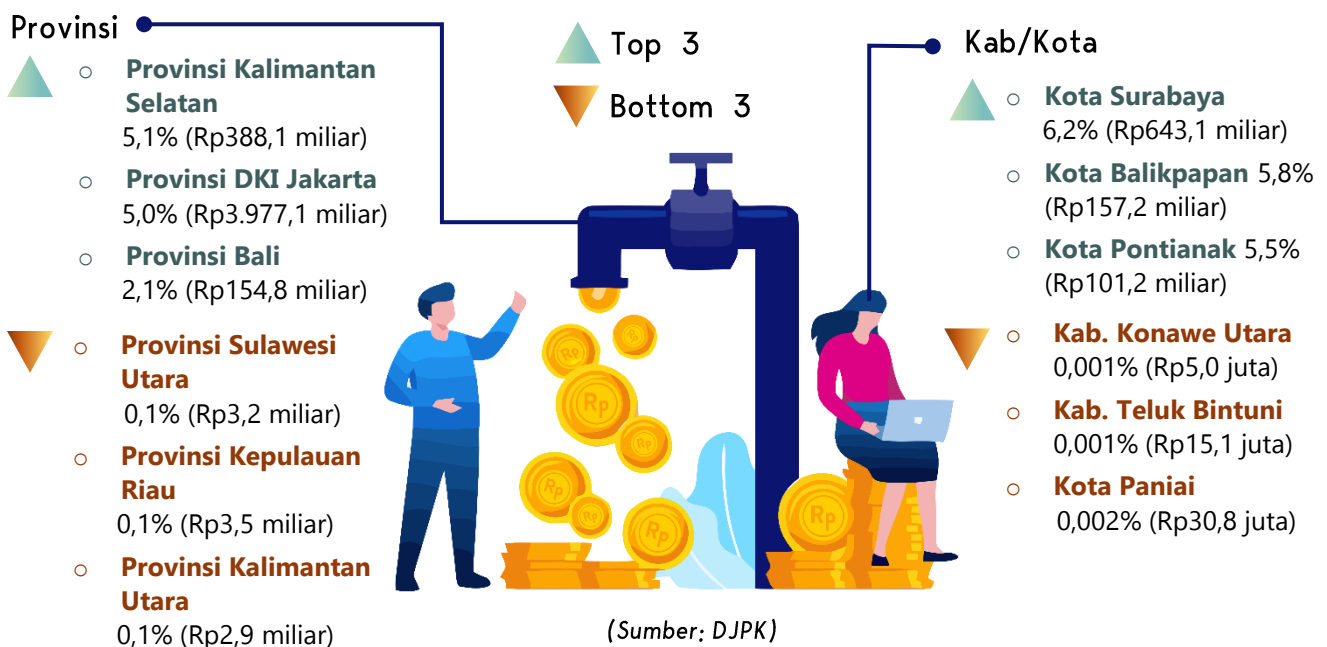
KINERJA DAERAH

Anggaran Belanja Infrastruktur Sumber Daya Air pada APBD

Grafik Anggaran Belanja Infrastruktur Sumber Daya Air (dalam Triliun Rp)



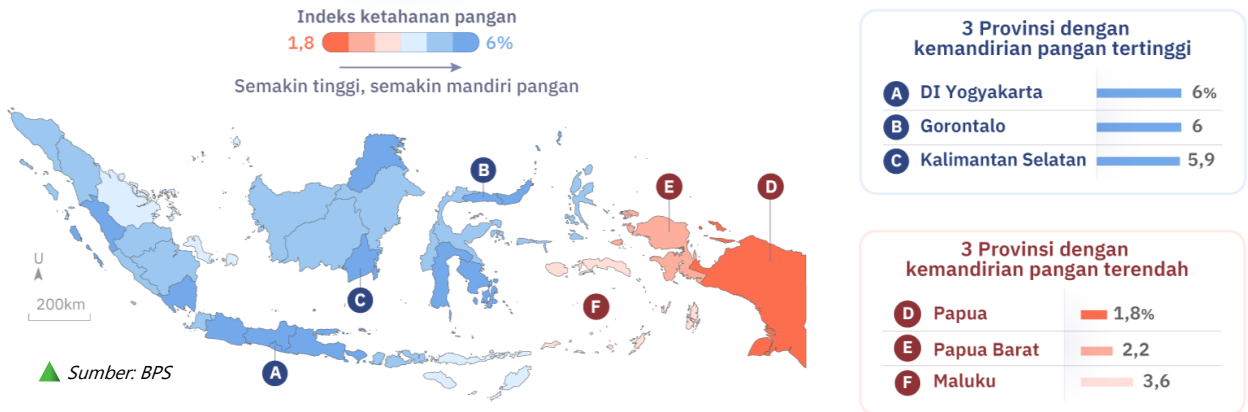
Provinsi dan Kab/Kota dengan Porsi Anggaran Belanja Infrastruktur Sumber Daya Air



Irigasi Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

Tantangan untuk memenuhi ketahanan pangan dunia terus berubah, seiring kondisi perubahan iklim, cuaca dan ledakan jumlah penduduk dunia. Pengembangan ketahanan sumber daya air, pangan dan nutrisi di tengah kondisi lingkungan yang semakin kompetitif perlu menjadi fokus pembangunan nasional. Hal ini merupakan respons terhadap arus dan tantangan di masa depan, dimana produksi pangan harus dua kali lipat pada 2050 untuk memenuhi permintaan populasi dunia yang terus bertambah, sementara daratan dan ketersediaan air menjadi terbatas.

Ketersediaan pangan yang mencukupi dengan harga terjangkau menjadi tantangan besar di Indonesia, karena jumlah penduduk yang besar dan luas wilayah pertanian yang semakin berkurang. Setiap provinsi di Indonesia perlu didorong untuk memiliki kemandirian pangan yang tinggi dimana masyarakat dapat terjamin pemenuhan kebutuhannya sampai di tingkat perseorangan dengan pemanfaatan sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan data dari BPS, Provinsi yang paling tinggi ketahanan pangannya adalah Yogyakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Hasil tersebut diukur dari indeks ketahanan pangan yang menjadi indikator kemandirian pangan yang berkisar antara 1,8-6% yang direpresentasikan dari pembobotan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.



Kemandirian pangan yang berbeda antar daerah ini juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan irigasi. Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa luas lahan baku sawah, baik yang beririgasi teknis maupun non irigasi mengalami penurunan rata-rata seluas 650 ribu hektar setiap tahun. Luas lahan pertanian yang hilang 650 ribu hektar tersebut, menurut BPS setara dengan produksi 6,5 juta ton beras. Di sisi lain, produktivitas pertanian di Indonesia juga masih rendah. Produktivitas pertanian Indonesia masih kalah jauh dari Thailand dan Vietnam yang mempunyai luas lahan lebih sempit dibandingkan Indonesia. Rendahnya produktivitas sektor pertanian di Indonesia, termasuk beras, antara lain disebabkan oleh pemanfaatan teknologi yang masih rendah dan kurangnya inovasi sektor pertanian. Beberapa komponen penting yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan pangan, antara lain:

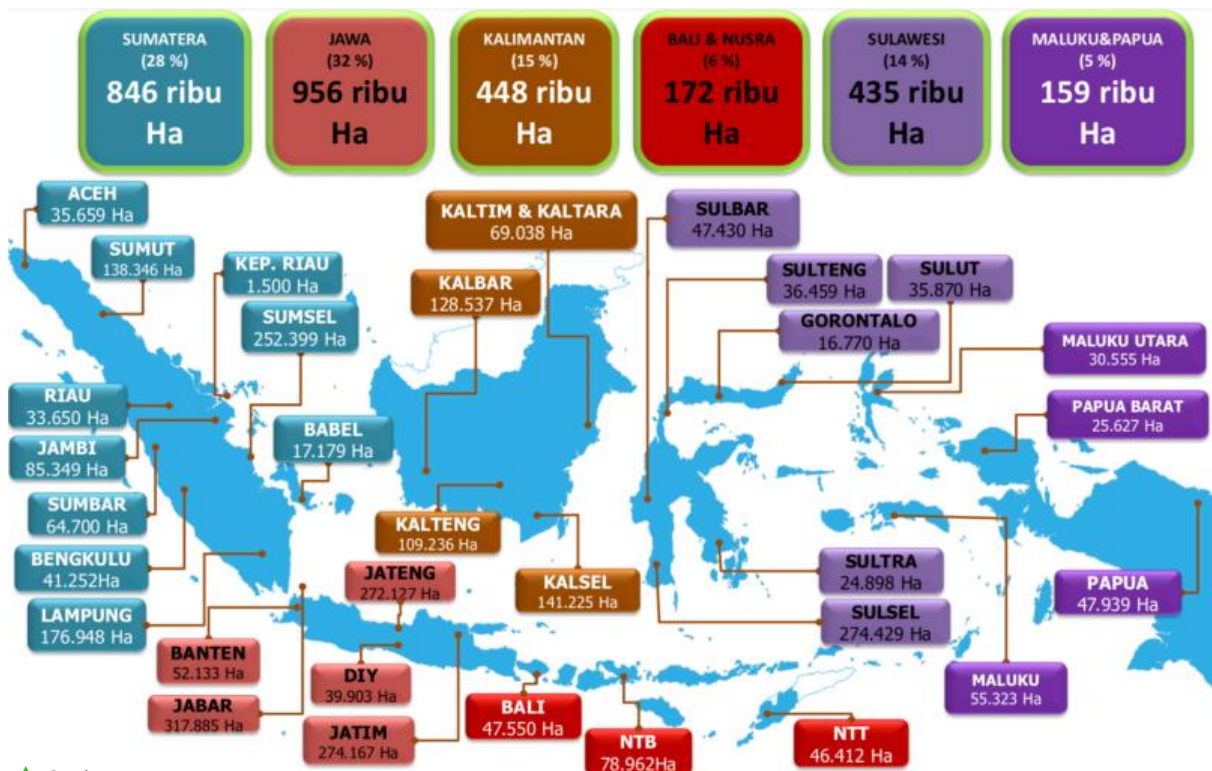


EDITORIAL

Irigasi Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

Salah satu dukungan penting untuk mendukung stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi musim adalah tersedianya infrastruktur pertanian melalui penyediaan irigasi, baik irigasi primer, sekunder dan tersier. Untuk itu, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan adalah dengan membangun tujuh irigasi di beberapa wilayah dalam memperkuat pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang telah dilakukan selama 2015-2019.

► Sebaran Rehabilitasi Irigasi Tahun 2015-2019



▲ Sumber:
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Dalam perencanaannya, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 500 ribu hektare (ha) irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektar jaringan irigasi pada tahun 2020-2024. Target ini untuk mendukung salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, untuk terus mewujudkan ketahanan pangan pemerintah juga tengah membangun *food estate* di dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. *Food estate* atau lumbung pangan tersebut dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Pembangunan *food estate* tersebut untuk memperkuat sektor hulu dan sektor pertanian di Indonesia secara sekaligus, sehingga mampu untuk menghasilkan produk pangan skala industri. Keberhasilan proyek lumbung pangan tersebut membutuhkan kerja sama dan kolaborasi antara stakeholder dan pelaku sektor pertanian, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta dan masyarakat.

INOVASI DAERAH

Inovasi Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Prov. Sumatera Barat

Irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan. Menurut data BPS, Prov. Sumatera Barat memiliki jaringan irigasi sepanjang 643,27 km yang mengairi daerah irigasi seluas 364,3 hektar, tersebar di 12 kabupaten dan 7 kota. Pengelolaan irigasi yang baik telah membawa Sumatera Barat memperoleh penghargaan peringkat terbaik pertama nasional dalam hal pengelolaan irigasi di Indonesia tahun 2017 dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Hal ini tidak terlepas dari beberapa Inovasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar, sebagai berikut.

Memiliki Komisi Irigasi yang dibentuk dengan SK Gubernur dan bertujuan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara wakil Pemda, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lain dalam merumuskan kebijakan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Komisi Irigasi telah menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya: penyusunan profil sosial ekonomi teknis dan kelembagaan pada lima daerah irigasi prioritas yang difasilitasi oleh Bappeda Sumbar, serta perbaikan kerusakan jaringan irigasi pada sejumlah daerah irigasi prioritas sesuai dengan usulan petani dan melibatkan perkumpulan petani pemakai air, pembentukan dan penguatan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air oleh Dinas Pertanian Sumbar.



Menerapkan sistem irigasi partisipatif, yaitu dengan melibatkan perkumpulan petani pemakai air termasuk pengelolaan infrastruktur irigasi secara partisipatif pada jaringan irigasi tersier. Adapun pembinaan terhadap kelembagaan petani tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pemprov. Dengan penerapan sistem irigasi partisipatif diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mewujudkan upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Inovasi di bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi meliputi peningkatan kinerja pengelolaan irigasi daerah irigasi kewenangan provinsi melalui penyusunan rekomendasi atau pedoman, penetapan pola dan jadwal tanam dalam mengantisipasi bencana kekeringan, banjir dan kabut asap, dan mendorong pengembangan teknologi hemat air. Selain itu, Pemprov juga mendorong kab/kota untuk menyediakan dan meningkatkan anggaran pengelolaan irigasi dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi di masing-masing Kab/Kota.

Berbagai inovasi yang telah dilakukan dan penghargaan yang diraih dalam bidang pengelolaan irigasi tersebut, diharapkan dapat terus mendorong inovasi dan perbaikan pengaturan pengelolaan irigasi di wilayah Sumatera Barat. Keberhasilan Pemprov Sumbar dalam bidang pengelolaan irigasi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya daerah-daerah yang memiliki wilayah pertanian yang luas. Contoh di Provinsi Sumatera Barat ini juga memperlihatkan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota diperlukan untuk dapat secara bersama-sama memajukan daerah.

Jaringan Irigasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi		Total Panjang
	Primer	Sekunder	
Kabupaten/Regency			
01. Kep. Mentawai	-	-	-
02. Pesisir Selatan	11 192	130 411	141 603
03. Solok	26 195	37 841	64 036
04. Sijunjung	6 461	8 493	14 954
05. Tanah Datar	15 874	49 807	65 681
06. Padang Pariaman	11 372	29 723	41 095
07. Agam	17 918	70 251	88 169
08. Lima Puluh Kota	3 744	26 040	29 784
09. Pasaman	2 666	19 226	21 892
10. Solok Selatan	25 481	25 792	51 273
11. Dharmasraya	-	-	-
12. Pasaman Barat	16 360	43 559	59 919
Kota/Municipality			
1. Padang	1 758	47 918	49 676
2. Solok	684	2 705	3 389
3. Sawahlunto	-	-	-
4. Padang Panjang	1 178	625	1 803
5. Bukittinggi	411	4 531	4 942
6. Payakumbuh	661	2 893	3 554
7. Pariaman	-	1 500	1 500
Jumlah/ Total	2017	141 955	501 315
	2016	141 955	501 315
	2015	141 955	501 315

Sumber: BPS 2017

KABAR DAERAH

Irigasi di Daerah

Kab. Aceh Selatan

Sekitar 2.229 hektare lahan persawahan di Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan terancam kekeringan. Hal ini dikarenakan saluran irigasi utama roboh sejak empat tahun lalu. Kini kondisi irigasi makin parah akibat tingginya intensitas hujan. Padahal persawahan yang airnya dialiri dari saluran irigasi ini meliputi beberapa desa di antaranya Gunung Pudung, Ruak dan Alur Mas. Kondisi irigasi yang parah tersebut menyebabkan suplai air ke persawahan warga terganggu dan terancam tak dapat melakukan tanam serentak tahun ini. Para petani terus berupaya melakukan perbaikan secara darurat. <https://aceh.inews.id>

Kab. Pasuruan

Pemkab Pasuruan mengalokasikan Rp6 miliar untuk menormalisasi 50 – 60 titik jaringan irigasi untuk memperbaiki pasokan air untuk persawahan. Pengerjaan normalisasi tahun 2021 ini dimulai akhir bulan Januari dengan lokasi saluran irigasi yang dinormalisasi berada di 7 kecamatan. Kegiatan normalisasi saluran dilakukan berdasarkan pemetaan terhadap lokasinya dan juga atas dasar usulan yang datang dari warga, pemerintah desa maupun kecamatan. Normalisasi diperlukan untuk meminimalisasi pendangkalan jaringan irigasi yang sering terjadi dan agar jaringan irigasi bisa tetap terjaga fungsinya. <https://surabaya.bisnis.com/>

Jakarta

Semua lini dikerahkan dalam mengatasi banjir di Jakarta. Selain normalisasi kali dan sungai serta penyediaan pompa air, sistem irigasi pertanian juga disiapkan mencegah banjir. Sistem irigasi pertanian di Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kini tengah dibenahi. Pembinaan saluran irigasi perlu dilakukan agar dapat mengendalikan banjir dan bermanfaat untuk lahan pertanian. Pembinaan sistem irigasi pertanian ini meliputi pembenahan saluran air Penghubung (Phb) Malaka mulai dari Pintu Air Tambun Rengas sampai dengan Saluran Phb Armain di Rorotan, dan Saluran Phb Armain sampai dengan Kali Blencong di Marunda. <https://metro.sindonews.com>

Kab. Purwakarta

Tahun ini, Pemkab Purwakarta membangun 5 saluran irigasi baru guna menunjang peningkatan produktifitas pertanian. Pemkab Purwakarta memproyeksikan peningkatan dari awalnya hanya 2 kali panen menjadi 3 kali panen. Selain akan membangun 5 saluran irigasi pada tahun ini, Pemkab Purwakarta juga akan memprioritaskan pada pemeliharaan 40 titik saluran irigasi yang sudah ada. Terdapat 64 Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kab. Purwakarta, dari 64 DI ini terdiri dari irigasi tersier yang panjangnya mencapai 91.675 meter dan irigasi sekunder yang panjangnya mencapai 38.258 meter. Dari total keseluruhan DI ini dapat mengairi lahan seluas 7.270 hektare lahan sawah. Selain melakukan perbaikan, Pemkab Purwakarta juga membangun 3 mercu bendung dari 8 DI yang ditingkatkan agar aliran airnya lebih terarah yang berbanding lurus dengan peningkatan hasil pertanian di Purwakarta. Selama 2020, dari luas panen 40.831 hektare menghasilkan 249.069,1 ton beras. <https://tvberita.co.id/>

Kab. Mukomuko

Pemkab Mukomuko, pada tahun 2021 merencanakan pembangunan irigasi perpipaan di Desa Sendang Mulya, guna mengairi lahan tanaman hortikultura seluas 10 hektare. Pembangunan irigasi perpipaan ini untuk mengoptimalkan fungsi embung penampung air yang dibangun tahun 2016 untuk mengairi lahan pertanian di wilayah tersebut. Selama ini, petani tanaman cabai merah di wilayah ini mengangkat air untuk menyirami tanamannya dari dam parit yang berada dekat dengan embung penampung air. Jaringan irigasi perpipaan ini semuanya menggunakan pipa yang terhubung dengan embung penampungan air, kemudian air dari embung dialirkan ke lahan tanaman pertanian dan hortikultura. Pembangunan irigasi perpipaan di Desa Sendang Mulya ini dilaksanakan secara swakelola oleh satu kelompok tani yang memiliki lahan tanaman hortikultura di wilayah tersebut. <https://bengkulu.antaranews.com/>

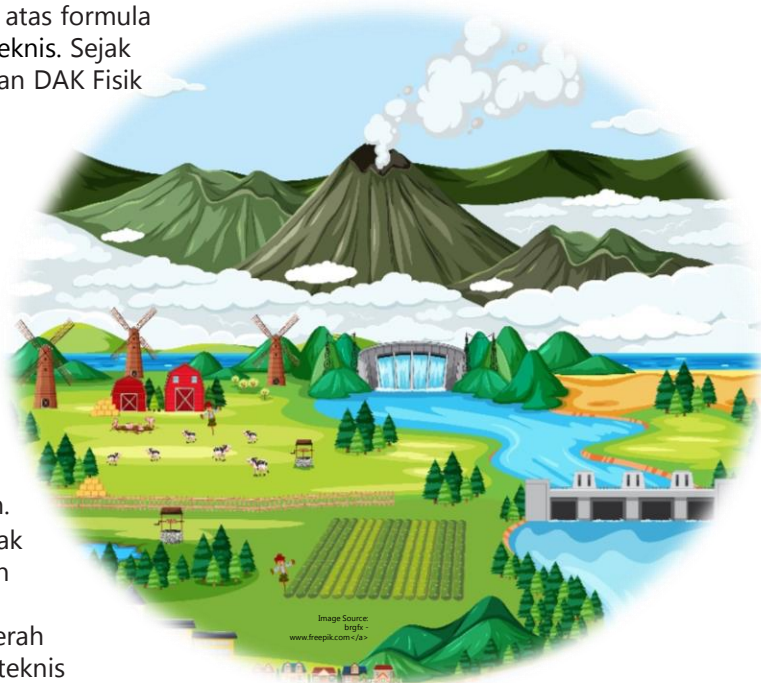
Kab. Karanganyar

Pemkab Karanganyar berencana memasang meteran listrik di area persawahan untuk irigasi pertanian secara bertahap pada tahun 2021 guna meningkatkan produktivitas pertanian padi saat musim kemarau. Pemasangan meteran listrik tersebut diprioritaskan kepada wilayah yang mengalami kekeringan. Selain peningkatan hasil panen, penggunaan listrik untuk irigasi pertanian diharapkan dapat menekan biaya operasional pertanian di Karanganyar hingga 50%. Terutama biaya membeli solar dan sewa diesel saat petani hendak mengairi sawah di musim kemarau. Pertimbangan lain adalah penggunaan listrik untuk irigasi pertanian lebih ramah lingkungan. <https://www.solopos.com/>

KAJIAN PILIHAN

Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur

Sebelum tahun 2016, pengalokasian DAK didasarkan atas formula dengan Kriteria umum, Kriteria khusus, dan Kriteria Teknis. Sejak tahun anggaran 2016 (hingga sekarang) pengalokasian DAK Fisik ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UU APBN. Perubahan pengalokasian DAK dari berdasarkan formula berubah menjadi usulan daerah didasarkan atas beberapa informasi yang diperoleh dalam kunjungan ke daerah dimana banyak daerah mempertanyakan pengalokasian DAK yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebagai contoh daerah yang tidak memiliki wilayah laut mendapat DAK bidang kelautan dan perikanan, atau daerah yang bukan daerah pertanian memperoleh DAK bidang pertanian. Ada beberapa daerah yang infrastruktur jalannya rusak tidak mendapatkan DAK bidang infrastruktur. Dengan pertimbangan kebutuhan daerah maka kebijakan pengalokasian DAK diarahkan kepada kebutuhan daerah melalui penyampaian proposal kepada Kementerian teknis (K/L), Bappenas dan Kementerian Keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus dan pencapaian penyediaan bidang infrastruktur irigasi di daerah.



Metode evaluasi yang dilakukan adalah membandingkan capaian standar pelayanan minimal dengan kondisi irigasi. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah secara *purposive* sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampling didasarkan atas keterwakilan secara proposional dari jumlah daerah yang ada per pulau. Penentuan sampel dengan teknik kluster atas 2 kriteria yaitu: opini laporan keuangan BPK dan tingkat kemajuan daerah (daerah tertinggal dan daerah tidak tertinggal). Berdasarkan pada klustering tersebut, kemudian dipilih sampel 52 daerah secara proporsional terhadap populasi jumlah pemerintah daerah sebanyak 542 provinsi/kabupaten/kota.

Setelah membandingkan antara data capaian standar pelayanan minimal dengan jumlah dana alokasi khusus bidang irigasi dapat diambil simpulan dan rekomendasi yaitu Dana alokasi khusus bidang irigasi semakin berkembang dari tahun 2012 – 2016. Perkembangan DAK tersebut jika dibandingkan dengan tingkat standar pelayanan minimal atas capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat di beberapa daerah masih belum mencapai target. Terdapat beberapa daerah yang sebenarnya standar pelayanan minimal untuk tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat telah mencapai target atau bahkan telah mencapai kondisi baik (70 -79) dan sangat baik (80 – 100) namun masih menerima DAK yang cukup signifikan. Hal ini terjadi, karena dasar pengalokasian yang dilakukan hanya didasarkan atas kondisi irigasi, dan tidak memperhatikan standar pelayanan minimal atas capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat. Pengalokasian DAK Fisik bidang irigasi, seperti ini akan memberikan dampak tidak tercapainya standar pelayanan minimal di beberapa daerah bahkan terjadi ketidakseimbangan pengalokasian.

Untuk itu perlu dilakukan perbaikan dasar pengalokasian DAK Fisik bidang irigasi dengan kembali menerapkan standar pelayanan minimal atas tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat sebagai salah satu indikator pengalokasian dalam menilai penyampaian usulan DAK Fisik oleh daerah. Dengan demikian, diharapkan pendistribusian alokasi Dana Alokasi Khusus bidang irigasi menjadi merata dan terjadi keseimbangan.

**Ruang lingkup infrastruktur yang dikaji oleh penulis adalah bidang jalan dan irigasi. Untuk laporan ini, hanya bidang irigasi yang disajikan.*

Penulis: Ari Gemini Parbinoto